



## STRATEGI PEMBINAAN SATUAN YONIF 200/BN DALAM MELAKSANAKAN OPERASI PENGAMANAN DAERAH RAWAN DI KABUPATEN YALIMO, PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN PERIODE 2023–2024

*STRATEGY FOR DEVELOPING THE 200/BN YONIF UNIT IN IMPLEMENTING  
SECURITY OPERATIONS IN VULNERABLE AREAS IN YALIMO REGENCY, PAPUA  
MOUNTAIN PROVINCE FOR THE 2023–2024 PERIOD*

Syarifuddin Sinaga<sup>1</sup>, M. Halkis<sup>2</sup>, Ari Pitoyo Sumarno<sup>3</sup>  
Prodi SPD, FSP, Unhan RI

**Abstract .** Operasi Pengamanan Wilayah di Pegunungan Papua menghadapi permasalahan yang kompleks, meliputi ancaman bersenjata, kondisi morfologi wilayah yang berat, serta dinamika sosial-budaya masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan Batalyon Infanteri 200/Bhakti Negara dalam meningkatkan efektivitas Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Ops Pamrahwan) di Kabupaten Yalimo periode 2023–2024, mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan, serta merumuskan strategi optimal yang adaptif dan kontekstual. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, serta validasi data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Batalyon Infanteri 200/BN telah mengintegrasikan unsur pembinaan personel dan karakter prajurit, pengembangan kemampuan operasional dan teritorial yang adaptif, serta dukungan logistik dan ideologis yang bersifat strategis. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur, medan operasi yang berat, serta kompleksitas sosial tetap menjadi kendala signifikan. Penelitian ini merekomendasikan model pengembangan satuan yang adaptif berbasis perspektif teritorial, kecerdasan sosial, dan sinergi multipihak guna meningkatkan efektivitas OMSP serta stabilitas keamanan di Pegunungan Papua. **Kata**

**Kunci:** Pengembangan Satuan, Batalyon Infanteri 200/BN, Operasi Pengamanan Wilayah, Pegunungan Papua.

***Abstract.** Regional Security Operations in the Papua Mountains face complex problems, including armed threats, severe morphological condition, and the socio-cultural dynamics of the local community. This study aims to analyze the development strategy of Infantry Battalion 200/Bhakti Negara in improving the effectiveness of Ops Pamrahwan in Yalimo Regency for*



*the period 2023–2024, identify development challenges and opportunities, and formulate optimal strategies that are adaptive and contextual. The research methodology used is qualitative, with a phenomenological approach, which includes in-depth interviews, field observations, and document analysis, as well as data validation through source triangulation. The research concluded that the development of Infantry Battalion 200/BN has integrated elements of personnel and soldier character development, adaptive operational and territorial progress, and strategic logistical and ideological support. However, constraints in infrastructure, operational terrain, and social complexity remain significant obstacles. This study advocates an adaptive unit development model based on a territorial perspective, social intelligence, and multi-party synergy to improve the effectiveness of OMSP and security stability in the Papua Mountains.*

**Keywords:** *Unit Development, Infantry Battalion 200/BN, Regional Security Operations, Papua Mountains*

## **Pendahuluan**

Perubahan lingkungan strategis global menunjukkan kecenderungan meningkatnya ancaman non-konvensional dan konflik asimetris. Negara-negara modern tidak lagi hanya menghadapi ancaman militer antarnegara (interstate war), tetapi juga konflik internal, separatisme, radikalisme, serta disrupsi informasi. Dalam konteks Indonesia, wilayah Papua Pegunungan menjadi salah satu episentrum tantangan keamanan nasional.

Kabupaten Yalimo memiliki karakteristik khusus berupa Geografi pegunungan ekstrem dengan akses transportasi terbatas, tingkat literasi dan indeks pembangunan manusia yang rendah, Konflik politik lokal pasca-Pilkada., Aktivitas kelompok bersenjata yang memanfaatkan keterisolasian wilayah.

Kondisi tersebut menjadikan operasi pengamanan di Yalimo bukan sekadar operasi militer, melainkan operasi stabilisasi sosial-politik. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, OMSP menjadi instrumen legal dalam menjaga stabilitas wilayah. Namun demikian, efektivitas OMSP sangat bergantung pada kualitas pembinaan satuan sebelum dan selama penugasan.



Kehadiran Yonif 200/BN bukan sekadar fungsi militer dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), melainkan representasi negara di wilayah krusial yang secara geografis, sosial, dan politik sangat rentan terhadap fragmentasi. Berdasarkan securitization theory (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998), ancaman terhadap integritas sosial-politik lokal dapat dipahami sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara secara keseluruhan, terutama bila tidak segera ditransformasi menjadi agenda keamanan yang sah oleh aktor-aktor negara.

Kehadiran Yonif 200/BN yang disinergikan dengan pemerintah daerah, aparat sipil, dan pemangku adat, menjadi instrumen preventif terhadap proses disintegrasi yang dapat berawal dari konflik mikro lokal seperti sengketa Pilkada atau rivalitas suku. Sebaliknya, bila dikemas dalam pendekatan pembinaan strategis, kehadiran Yonif 200/BN dapat menjadi katalisator penguatan kohesi sosial dan regenerasi loyalitas masyarakat terhadap entitas kebangsaan Indonesia.

Kehadiran Yonif 200/BN yang disinergikan dengan pemerintah daerah, aparat sipil, dan pemangku adat, menjadi instrumen preventif terhadap proses disintegrasi yang dapat berawal dari konflik mikro lokal seperti sengketa Pilkada atau rivalitas suku. Sebaliknya, bila dikemas dalam pendekatan pembinaan strategis, kehadiran Yonif 200/BN dapat menjadi katalisator penguatan kohesi sosial dan regenerasi loyalitas masyarakat terhadap entitas kebangsaan Indonesia.

Papua sebagai wilayah strategis sekaligus rawan menuntut kehadiran satuan militer yang tidak hanya siap secara fisik dan taktis, tetapi juga sensitif secara sosial dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Strategi pembinaan satuan Yonif 200/BN menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan operasi pengamanan daerah rawan, terutama dalam konteks operasi militer selain perang yang bersifat dinamis, kompleks, dan penuh tantangan. Dengan memperkuat strategi pembinaan yang responsif, kontekstual, dan berorientasi jangka panjang, satuan ini diharapkan mampu menjawab tantangan keamanan Papua secara



profesional dan bermartabat, sekaligus memperkuat integrasi nasional di wilayah perbatasan timur Indonesia.

Peneliti akan Melalui analisis yang berbasis sinergi multiaktor dan pendekatan holistik, strategi ini dibedah dalam beberapa sub-fokus berikut:

1. Kondisi dan tantangan personel Yonif 200/BN dalam melaksanakan pembinaan satuan pada Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Kabupaten Yalimo periode 2023–2024
2. Kemampuan personel Yonif 200/BN dalam aspek komunikasi, karakter prajurit, dan adaptasi operasional terhadap lingkungan geografis, sosial, dan budaya Kabupaten Yalimo
3. Strategi pembinaan satuan Yonif 200/BN yang diterapkan untuk mengatasi tantangan pembinaan personel, pembinaan operasional dan teritorial adaptif, serta pembinaan dukungan logistik dan ideologi strategis selama penugasan Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Kabupaten Yalimo periode 2023–2024.

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti pada kurun waktu periode 2023–2024, kurun waktu ini dipilih karena mencakup periode peneliti melaksanakan tugas operasi tempat penelitian dilaksanakan

Penelitian ini penting untuk pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan, khususnya dalam memahami strategi pembinaan satuan Yonif 200/BN dalam rangka operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Papua. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmu pertahanan, khususnya dalam ranah pembinaan satuan dan operasi militer selain perang (OMSP). Dengan menekankan pentingnya integrasi antara pembinaan taktis, sosial, dan intelijen, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana doktrin pembinaan satuan dapat disesuaikan dengan konteks konflik lokal dan kebutuhan keamanan manusia



## **Kajian Pustaka**

### **Teori Ketahanan Nasional**

Ketahanan nasional merupakan konsep strategis yang berakar pada kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi dan mengelola berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) demi menjamin keberlanjutan eksistensi negara. Lemhannas RI (2020) mendefinisikan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan suatu bangsa dalam mempertahankan eksistensinya, melalui integrasi dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam konteks Papua Pegunungan, khususnya Kabupaten Yalimo sebagai wilayah operasi Yonif 200/BN, konsep ketahanan nasional ini menjadi sangat relevan. Wilayah ini merupakan titik rawan yang sarat dengan tantangan multi-dimensional: dari kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbelakangan infrastruktur dan pendidikan, hingga eksistensi kelompok separatis dan konflik antar masyarakat. Dalam situasi seperti ini, strategi pembinaan satuan militer bukan hanya soal peningkatan kapabilitas tempur, melainkan juga menyangkut kesiapan moral, sosial, dan ideologis prajurit untuk menjalankan pendekatan operasi militer selain perang (OMSP).

### **Teori Keamanan Perbatasan**

Keamanan perbatasan merupakan aspek krusial dalam menjaga kedaulatan negara dan mencegah ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Menurut Andreas (2003), konsep keamanan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pengamanan fisik terhadap wilayah negara, tetapi juga mencakup pengelolaan arus barang, manusia, dan informasi yang melintas di perbatasan. Dalam konteks pertahanan negara, keamanan perbatasan bertujuan untuk



mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia, penyelundupan barang terlarang, dan infiltrasi kelompok bersenjata yang dapat mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, strategi pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat reaktif dalam merespons ancaman, tetapi juga proaktif dengan membangun sistem deteksi dini dan kerja sama antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perbatasan. Dari perspektif militer, pengamanan perbatasan berlandaskan pada konsep Border Security Management, yang menekankan pentingnya integrasi antara pertahanan, penegakan hukum, dan pembangunan sosial- ekonomi di wilayah perbatasan (Ganor, 2008). Prinsip utama dalam pengamanan perbatasan meliputi penguatan pengawasan wilayah melalui patroli berbasis teknologi, peningkatan infrastruktur pertahanan seperti pos perbatasan dan sensor deteksi, serta kerja sama dengan masyarakat lokal dalam menjaga stabilitas keamanan.

### **Teori Strategi Militer**

Strategi militer merupakan seni dan ilmu dalam merancang serta mengarahkan penggunaan kekuatan bersenjata secara efektif untuk mencapai tujuan politik dan keamanan negara. Gray (2010) menjelaskan bahwa strategi militer menghubungkan tujuan politik dengan kekuatan militer melalui alat dan metode yang bersifat operasional, mencakup tataran konseptual hingga teknis. Dalam praktiknya, strategi ini tidak hanya dilaksanakan pada tataran komando pusat, tetapi juga harus dimanifestasikan secara menyeluruh pada level satuan bawah seperti batalyon infanteri, termasuk Yonif 200/BN.

Gagasan ini sejalan dengan pendekatan Mission Command yang dikembangkan oleh Egnell & Haldén (2018), yang menekankan bahwa satuan militer modern harus mampu mengeksekusi misi dengan disiplin struktural, namun tetap diberi otonomi dalam pelaksanaan taktis. Dalam wilayah operasi yang penuh



ketidakpastian dan keterbatasan seperti Yalimo, Papua Pegunungan, fleksibilitas komando dan kemandirian operasional menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pembinaan yang mendalam diperlukan agar setiap personel memiliki kemampuan adaptif, daya tahan fisik dan psikis, serta kecakapan sosial yang tinggi.

### **Teori Pembinaan Satuan**

Opini Secara konseptual, pembinaan satuan dapat diartikan sebagai proses manajemen dan operasional yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan prajurit dan satuannya agar mampu melaksanakan tugas pokok secara optimal, baik dalam operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP). Model pembinaan ini menekankan pada kesiapan personel dari sisi fisik, mental, moral, intelektual, sosial, serta logistik sebagai fondasi utama yang menopang keberhasilan misi Schulz dan Simmons (2020), dalam studi mengenai kesiapan militer di zona konflik asimetris, menegaskan bahwa keberhasilan satuan dalam misi stabilisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pembinaan sebelum, selama, dan setelah penugasan. Mereka menjelaskan bahwa pembinaan yang tidak kontekstual terhadap kondisi medan operasi cenderung gagal membentuk satuan yang responsif terhadap kompleksitas ancaman di lapangan. Pembinaan harus didesain berdasarkan profil ancaman, karakteristik medan, serta sensitivitas sosial yang akan dihadapi oleh satuan tugas, terutama dalam lingkungan seperti Papua yang memiliki dinamika konflik unik dan intensitas hubungan sipil-militer yang sensitif.

### **Teori Civil-Military Cooperation (CIMIC)**

Dalam dinamika operasi militer kontemporer, terutama di wilayah-wilayah yang tergolong rawan konflik seperti Papua, konsep hubungan sipil-militer atau Civil-Military Cooperation (CIMIC) menjadi sangat penting untuk dijadikan salah



satu kerangka dasar dalam strategi pembinaan satuan. CIMIC bukan lagi hanya sebagai pelengkap operasi militer, melainkan telah menjadi elemen inti dalam keberhasilan misi, khususnya dalam konteks operasi militer selain perang (OMSP), yang mengedepankan aspek stabilisasi dan rekonsiliasi sosial.

Caballero-Anthony (2018) dalam kerangka human security menjelaskan bahwa keberhasilan operasi militer di Asia Tenggara seringkali tidak diukur dari jumlah musuh yang dinetralkan, tetapi dari seberapa besar pengaruh militer dalam menciptakan ruang aman dan stabil bagi masyarakat sipil. Di sinilah letak pentingnya CIMIC. Pendekatan ini menempatkan militer tidak sekadar sebagai pemegang kekuatan koersif, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab membangun kepercayaan publik, menyambungkan program pemerintah dengan masyarakat, dan menjadi penggerak dalam rekonstruksi sosial.

### **Teori Penta Helix**

Teori Penta Helix adalah pendekatan kolaboratif dalam pembangunan yang melibatkan lima aktor utama: pemerintah, akademisi, bisnis atau industri, masyarakat, dan media (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Model ini merupakan pengembangan dari konsep Triple Helix, yang awalnya hanya melibatkan interaksi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam inovasi dan pembangunan ekonomi (Leydesdorff & Etzkowitz, 1996). Dalam konteks yang lebih luas, teori Penta Helix menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, serta media sebagai katalis dalam penyebaran informasi dan transparansi kebijakan. Pendekatan ini menjadi relevan dalam berbagai aspek pembangunan nasional, termasuk pertahanan, keamanan, dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Penerapan teori Penta Helix dalam pengamanan perbatasan dan ketahanan



pangan memungkinkan integrasi kebijakan lintas sektor yang lebih efektif. Pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan strategis serta menyediakan anggaran dan regulasi yang mendukung keamanan perbatasan dan ketahanan pangan. Akademisi berperan dalam menyediakan kajian ilmiah yang dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang berbasis bukti. Sementara itu, sektor bisnis atau industri dapat mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi dalam mendukung produksi pangan dan sistem logistik yang aman di perbatasan (Sánchez-Barrioluengo, 2014).

### **Teori Analisis SWOT**

Pendekatan ini berguna untuk mengenali Potensi dan Risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Analisis SWOT umumnya diterapkan dalam konteks bisnis. Dalam lingkungan bisnis, tiap elemen memiliki faktor-faktor khusus yang harus dievaluasi. Faktor-faktor tersebut meliputi kekuatan (strengths) yang dimiliki oleh organisasi serta kelemahan (weaknesses) yang perlu diperhatikan.

Di sisi lain, aspek-aspek eksternal juga harus diselidiki untuk mengidentifikasi peluang (opportunities) yang tersedia bagi organisasi serta ancaman (threats) yang mungkin timbul. EFAS dan IFAS merupakan langkah lanjutan dari penerapan analisis SWOT, yang mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap masa depan dari organisasi. Faktor-faktor dalam analisis SWOT diberi bobot dan diberi peringkat serta skor untuk dapat diproses pada tabel Internal Factors Analysis Summary (IFAS) serta External Factors Analysis Summary (EFAS). Hasil dari IFAS maupun EFAS, berupa nilai kuantitatif, digunakan untuk mengevaluasi posisi organisasi atau strategi organisasi dengan menempatkan nilai yang didapat pada GE McKinsey 9 Box Matrix atau diagram 9 sel. Kemudian, faktor-faktor yang signifikan dipilih dari IFAS dan EFAS, berdasarkan pertimbangan faktor yang dianggap penting dan memberikan kontribusi besar terhadap visi organisasi.



Hal ini menjadi dasar untuk melakukan analisis dalam tabel Strategic Factors Analysis Summary (SFAS).

### **Fishbone Theory**

Dikenal juga sebagai Diagram Ishikawa atau Fishbone Diagram yang penggunaannya dapat mengelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam pengendalian kualitas (QC) produk atau layanan. Secara evolusioner, Diagram Ishikawa dapat digunakan secara luas untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan penyebab-penyebab masalah dalam berbagai aspek organisasi. Fishbone Diagram digunakan untuk mengilustrasikan faktor-faktor penyebab serta dampak yang ditimbulkannya. Diagram ini juga dikenal juga sebagai Cause and Effect Diagram, namun lebih dikenal dengan Fishbone Diagram dikarenakan oleh bentuk diagramnya yang menyerupai sebuah kerangka tulang ikan.

Konsep ini juga memberikan landasan untuk mengidentifikasi penyebab utama (tulang besar) dari masalah yang dihadapi, yang bersumber dari konsep yaitu manusia (man), anggaran (money), materiil (materiels), dan metode (method). Namun, pengembangannya dapat disesuaikan dengan situasi yang spesifik. Penyebab utama ini kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi poin-poin spesifik (tulang kecil), yang bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang paling berpengaruh secara mendetail. Kunci dari pendekatan ini adalah mengidentifikasi 3 hingga 6 kategori utama yang mencakup aspek-aspek yang memiliki dampak paling signifikan. Ide-ide utama direpresentasikan dalam tulang besar sementara ide-ide spesifik direpresentasikan dalam tulang kecil. Semakin rinci analisis terhadap permasalahan, semakin baik pemahaman terhadap akar penyebabnya.



### **Metode dan Desain Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci (human instrument), sehingga validitas data sangat bergantung pada kemampuan interpretatif peneliti dalam memahami relasi antara strategi pembinaan dan tantangan nyata di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan metode snowball sampling, yakni mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci dari kalangan perwira Yonif 200/BN, pelatih, staf pembinaan Kodam atau Kodim setempat, serta masyarakat lokal Papua yang terlibat dalam interaksi dengan satuan tersebut.

### **Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan lokasi yang relevan dengan sasaran atau permasalahan penelitian serta menjadi sumber data utama yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang Sumatera Selatan dan di Kabupaten Yalimo Papua. Lokasi tersebut dipilih karena memang Markas Komando dari Batalyon Infantri 200/BN berlokasi dan di Palembang Sumatera Selatan dan Yalimo Papua sebagai daerah operasi pengamanan daerah rawan Papua dimana informan berada yang dapat memberikan informasi secara komprehensif untuk dapat membantu penyelesaian dari penelitian ini.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Sugiyono (2023:h.11) dalam Bisara (2009), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dalam



penelitian ini Subjek penelitian ini mencakup 3 entitas utama yang memegang peran penting dalam operasi pengamanan daerah rawan Papua, yaitu TNI AD (melalui satuan tugas pengamanan perbatasan, Kodim setempat), Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat setempat.

Objek dari penelitian ini adalah strategi pembinaan yang dijalankan oleh Yonif 200/BN dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di provinsi Papua, khususnya yang berkaitan dengan upaya membentuk satuan tempur yang tidak hanya siap secara fisik dan taktis, tetapi juga mampu menjadi aktor sosial yang membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas teritorial. Pembinaan satuan dalam konteks Papua bukan hanya ditujukan untuk penguasaan taktik militer, tetapi juga penguatan moral, ideologi, kemampuan komunikasi sosial, serta penyesuaian terhadap karakteristik sosial-budaya lokal.

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013). Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

### **Hasil Pengolahan Data**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji strategi pembinaan yang dijalankan oleh Yonif 200/BN dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di provinsi Papua, khususnya yang berkaitan dengan upaya



membentuk satuan tempur yang tidak hanya siap secara fisik dan taktis, tetapi juga mampu menjadi aktor sosial yang membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas teritorial. Pembinaan satuan dalam konteks Papua bukan hanya ditujukan untuk penguasaan taktik militer, tetapi juga penguatan moral, ideologi, kemampuan komunikasi sosial, serta penyesuaian terhadap karakteristik sosial-budaya lokal.

### **Sinkronisasi Aspek Pembinaan dengan Fokus Operasi**

Strategi pembinaan satuan Yonif 200/BN menunjukkan tingkat sinkronisasi yang sangat kuat dan terencana antara berbagai aspek pembinaan (personel, teritorial, intelijen, ideologi, logistik, sosial) dengan fokus operasi di Papua Pegunungan yang secara inheren kompleks. Konteks wilayah ini, yang ditandai oleh dinamika ancaman hybrid (militer dan non-militer) serta kebutuhan sosial-kultural yang spesifik, menuntut pendekatan multidimensional dari satuan militer. Sinkronisasi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perancangan strategis yang disengaja untuk menciptakan satuan yang responsif dan efektif.

a. **Personel:** Pembinaan personel diorientasikan untuk menciptakan prajurit multidimensional. Ini berarti prajurit tidak hanya dituntut memiliki ketangguhan fisik dan mental yang superior untuk menghadapi medan ekstrem dan ancaman fisik dari KKB (Ops Pamrahwan), tetapi juga harus adaptif secara kultural.

b. **Teritorial:** Kemampuan teritorial berfungsi sebagai jembatan strategis antara TNI dan masyarakat. Ini bukan sekadar pembinaan fisik wilayah, melainkan upaya mendalam untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Melalui OMSP, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kerja bakti, Yonif



200/BN menunjukkan komitmen nyata kepada masyarakat, yang secara efektif meredakan penolakan dan memenangkan hati rakyat.

c. Intelijen: Fungsi intelijen di Yonif 200/BN melampaui pengumpulan informasi ancaman militer konvensional. Ia juga berfokus pada "intelijen sosial," yaitu pemahaman mendalam tentang dinamika sosial-politik, struktur adat, dan identifikasi tokoh-tokoh kunci di masyarakat.

d. Ideologi: Pembinaan ideologi di Yonif 200/BN ditujukan untuk menumbuhkan Pancasila sebagai perekat bangsa yang kontekstual. Ini melibatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kearifan lokal, serta pengembangan kemampuan kontra-narasi terhadap propaganda separatis yang berupaya memecah belah.

e. Logistik: Aspek logistik dirancang untuk mendukung keberlanjutan operasi di medan sulit dan berfungsi sebagai instrumen OMSP. Dalam kondisi geografis Papua Pegunungan yang menantang, strategi logistik harus sangat adaptif, menggunakan berbagai moda transportasi dan inovasi seperti airdrop. Keandalan logistik tidak hanya memastikan pasokan militer (amunisi, makanan, medis) tetap lancar, tetapi juga memungkinkan distribusi bantuan kemanusiaan.

f. Sosial: Pendekatan sosial adalah inti dari strategi humanis Yonif 200/BN. Prioritas diberikan pada dialog, pendekatan persuasif, dan pemberdayaan masyarakat. Ini bertujuan untuk meminimalkan konflik, meredakan penolakan, dan membangun legitimasi kehadiran TNI.



### **Adaptasi terhadap Ancaman Hybrid dan Kebutuhan Sosial Kultural**

Strategi pembinaan satuan Yonif 200/BN secara jelas mengadopsi pendekatan yang sangat responsif dan adaptif terhadap ancaman hybrid dan kebutuhan sosial kultural yang khas di wilayah Papua Pegunungan. Pendekatan hybrid merujuk pada kombinasi ancaman militer konvensional dan non-konvensional, termasuk propaganda, disinformasi, serta eksploitasi isu-isu sosial dan budaya oleh kelompok separatis. Menghadapi spektrum ancaman yang kompleks ini, Yonif 200/BN tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga secara cerdas mengintegrasikan elemen-elemen non-militer dalam strategi pembinaannya, diantaranya:

- a. Latihan Operasi yang Responsif
- b. Pendekatan Humanis dan Kultural
- c. Pemanfaatan OMSP

### **Mekanisme Koordinasi dan Evaluasi**

Koordinasi yang kuat antara unsur staf dan komando (Danyon, Wadanyon) serta evaluasi berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan.

a. Koordinasi Internal:

Rapat staf harian dan mingguan memastikan integrasi data intelijen, perencanaan logistik, pengembangan teritorial, dan pembinaan ideologi. Pasi Ops, Pasi Intel, dan Pasi Pers secara rutin berkoordinasi untuk menyelaraskan program

b. Koordinasi Eksternal:

Kerja sama dengan intelijen kewilayahan (BIN, BAIS, Intel Kodam) dan instansi sipil (Pemerintah Daerah, Tokoh Adat) memperluas gambaran intelijen dan menyinkronkan upaya pembangunan. Pemerintah Lokal mengonfirmasi adanya pertemuan koordinasi rutin dengan TNI.

c. Evaluasi Adaptif:

Post-Action Review (PAR) setelah setiap operasi, evaluasi harian/mingguan, dan uji kompetensi lapangan (UKL) secara berkala memungkinkan identifikasi kelemahan dan penyesuaian strategi secara cepat dan adaptif

## Pembahasan

### Faktor-faktor Penentu Efektivitas Strategi Pembinaan Satuan (Analisis Fishbone)

Fishbone digunakan untuk memvisualisasikan secara komprehensif faktor-faktor utama yang berkontribusi pada efektivitas strategi pembinaan satuan Yonif 200/BN di Papua Pegunungan. Efektivitas ini mencakup keberhasilan dalam Ops Pamrahwan dan OMSP, serta kemampuan satuan untuk merespons dinamika ancaman hybrid dan kebutuhan sosial kultural.





a. **Man (Personel):**

1) **Kualitas Prajurit (Fisik, Mental, EQ, CQ):**

Ini adalah inti dari kapabilitas satuan. Prajurit yang tangguh secara fisik dan mental, serta memiliki kecerdasan emosional dan kultural tinggi (EQ dan CQ), lebih mampu beradaptasi dengan medan sulit, tekanan operasional, dan interaksi sosial budaya yang kompleks. Tanpa kualitas ini, prajurit mudah kelelahan, terprovokasi, dan gagal membangun kepercayaan.

2) **Pelatihan Sosiokultural:**

Pelatihan yang mencakup bahasa daerah, adat istiadat, dan sensitivitas budaya merupakan prasyarat mutlak. Prajurit yang terlatih secara sosiokultural akan lebih efektif dalam komunikasi sosial, mengurangi kesalahpahaman, dan membangun hubungan positif dengan masyarakat.

3) **Kesejahteraan Prajurit:**

Kondisi moril dan loyalitas prajurit sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan mereka, termasuk dukungan psikologis (konseling) dan fasilitas dasar. Prajurit yang sejahtera cenderung lebih fokus pada tugas dan memiliki semangat juang yang tinggi.

4) **Penempatan Strategis:**

Penempatan personel dengan kompetensi teritorial atau personel asli Papua di pos-pos kunci dapat meningkatkan efektivitas OMSP dan intelijen sosial, karena mereka memiliki pemahaman lokal yang lebih



baik.

b. **Method (Teritorial):**

1) **Pendekatan Humanis & Komunikasi Sosial:**

Metode operasi yang mengedepankan dialog, empati, dan bantuan kemanusiaan adalah kunci. Komsos yang efektif dapat meredam penolakan dan membangun citra positif TNI.

2) **Keterlibatan Tokoh Adat:**

Melibatkan tokoh adat dalam setiap kegiatan atau pengambilan keputusan operasional menunjukkan penghargaan terhadap kearifan lokal dan memfasilitasi penerimaan masyarakat terhadap kehadiran TNI.

3) **Relevansi OMSP:**

Program OMSP harus relevan dengan kebutuhan riil masyarakat (misalnya kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar). OMSP yang tepat sasaran akan memberikan dampak nyata dan memperkuat kepercayaan.

4) **Pemetaan Sosial Budaya:**

Pemahaman mendalam tentang struktur sosial, kelompok-kelompok masyarakat, dan isu-isu sensitif lokal (melalui pemetaan sosial budaya) memungkinkan satuan untuk merancang pendekatan yang lebih efektif dan menghindari kesalahan fatal.



c. **Measurement (Intelijen):**

1) **Akurasi Informasi (IPB, Early Warning):**

Kualitas keputusan operasional sangat bergantung pada akurasi dan ketepatan waktu informasi intelijen, baik IPB militer maupun *early warning* untuk potensi konflik sosial.

2) **Jaringan Informan:**

Pembangunan jaringan informan yang handal di tingkat komunitas adalah kunci untuk mengumpulkan informasi lokal yang sulit dijangkau melalui metode formal, sekaligus mendeteksi ancaman *hybrid*.

3) **Koordinasi Lintas Sektoral:**

Kerjasama intelijen dengan BIN, BAIS, Kodim, dan intelijen sipil lainnya memperkaya gambaran medan intelijen dan memungkinkan respons yang terintegrasi.

4) **Deteksi Ancaman Hybrid:**

Kemampuan intelijen untuk tidak hanya memetakan ancaman KKB tetapi juga menganalisis dinamika sosial-politik, propaganda, dan isu-isu SARA adalah esensial untuk menghadapi ancaman *hybrid*.

d. **Material (Ideologi):**

1) **Pemahaman Pancasila:**

Prajurit dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang Pancasila sebagai ideologi negara dan perekat bangsa, yang relevan dengan kearifan lokal.



2) **Kontra Propaganda:**

Kemampuan untuk secara efektif melawan narasi separatis dan disinformasi melalui komunikasi informasi yang positif dan berbasis fakta sangat penting untuk menjaga moral dan opini publik.

3) **Relevansi Narasi:**

Pesan-pesan ideologi harus disampaikan dalam narasi yang relevan, mudah dipahami, dan diterima oleh masyarakat lokal, bukan sekadar doktrin yang kaku.

4) **Internalisasi Nilai & Ketahanan Moril:**

Prajurit harus menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan memiliki ketahanan moril yang kuat untuk tidak terprovokasi, serta menjadi agen ideologi yang positif di masyarakat.

e. **Environment (Logistik):**

1) **Rantai Pasok Adaptif:**

Sistem logistik harus fleksibel dan adaptif terhadap kondisi geografis ekstrem, menggunakan berbagai moda transportasi (darat, udara, *airdrop*) dan jalur alternatif.

2) **Kemandirian Prajurit:**

Pembekalan keterampilan prajurit dalam pemeliharaan alat dan pengelolaan logistik dasar (misalnya *survival*) meningkatkan kemandirian operasional di lapangan.



3) **Dukungan Fasilitas:**

Ketersediaan fasilitas dasar di pos-pos (kesehatan, ibadah, air bersih) sangat penting untuk menjaga kesejahteraan dan moral prajurit.

4) **Distribusi Airdrop & Teknologi Pendukung:**

Penggunaan *airdrop* atau teknologi drone kargo adalah solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan akses, sementara teknologi pendukung (GPS, radio) memastikan koordinasi logistik.

f. **Machine (Sistem Sosial/Mekanisme Sosial):**

1) **Kepercayaan Masyarakat:**

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI adalah indikator kunci keberhasilan. Kepercayaan ini dibangun melalui tindakan humanis, OMSP, dan penghormatan terhadap budaya.

2) **Partisipasi OMSP:**

Partisipasi aktif masyarakat dalam program OMSP menunjukkan penerimaan dan kolaborasi, yang berkontribusi pada pembangunan kohesi sosial dan mengurangi dukungan terhadap kelompok separatis.

3) **Pengurangan Penolakan:**

Penurunan tingkat penolakan masyarakat terhadap kehadiran atau operasi TNI merupakan bukti efektivitas pendekatan sosial dan teritorial.

4) **Adaptasi Budaya & Penanganan Konflik:**

Kemampuan satuan untuk beradaptasi dengan budaya lokal dan

memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani konflik sosial (misalnya mediasi dengan tokoh adat) adalah esensial untuk stabilitas jangka panjang.

### Analisis SWOT Strategi Pembinaan Satuan Yonif 200/BN

analisis SWOT diterapkan untuk mengevaluasi strategi pembinaan satuan Yonif 200/BN di Papua Pegunungan. Analisis ini mengidentifikasi faktor-faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (Peluang dan Ancaman) yang relevan dan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas strategi dalam menghadapi dinamika ancaman hybrid dan kebutuhan sosial kultural di wilayah operasi.



#### 1. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan adalah kapabilitas internal dan sumber daya yang dimiliki Yonif 200/BN yang memberikan keunggulan dalam melaksanakan strategi pembinaan satuan. Kekuatan ini berasal dari praktik internal dan sumber daya yang dapat dikendalikan.



- a. Pendekatan Pembinaan Holistik dan Adaptif
- b. Kemampuan Adaptasi Medan dan Budaya Tinggi
- c. Intelijen yang Komprehensif dan Terintegrasi
- d. OMSP sebagai Strategi Kunci.
- e. Koordinasi Internal dan Eksternal yang Kuat
- f. Fokus pada Pembinaan Ideologi Kontekstual
- g. Sistem Evaluasi Berkelanjutan
- h. Pemanfaatan Personel Lokal

## **2. Weaknesses (Kelemahan)**

Kelemahan adalah keterbatasan internal atau kekurangan sumber daya yang dapat menghambat kinerja Yonif 200/BN. Kelemahan ini berada dalam kendali satuan dan dapat diperbaiki.

- a. Keterbatasan Pemahaman Kultural Prajurit
- b. Keterbatasan Infrastruktur Komunikasi dan Latihan
- c. Rasa Curiga Masyarakat Adat
- d. Tantangan Geografi Ekstrem
- e. Keterbatasan Anggaran Daerah
- f. Dinamika Politik Lokal dan Isu Adat

## **3. Opportunities (Peluang)**

Peluang adalah faktor-faktor eksternal yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan oleh Yonif 200/BN untuk meningkatkan efektivitas strategi pembinaan satuan. Peluang ini berada di luar kendali satuan tetapi dapat dieksploitasi.

- a. Dukungan Penuh dari Pemerintah Lokal dan Tokoh Adat



- b. Revisi UU TNI tentang OMSP
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
- e. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Peran TNI sebagai Mitra Pembangunan

#### 4. Threats (Ancaman)

Ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang tidak menguntungkan yang dapat membahayakan atau menghambat efektivitas strategi pembinaan satuan Yonif 200/BN. Ancaman ini berada di luar kendali satuan tetapi harus dimitigasi.

- a. Pola Pergerakan KKB yang Berubah-ubah.
- b. Peningkatan Propaganda dan Disinformasi Separatis
- c. Upaya Infiltrasi dan Intimidasi Kelompok Separatis
- d. Isu SARA dan Trauma Historis
- e. Keterbatasan Akses dan Keterpencilan Wilayah
- f. "Militerisasi" Isu Sipil

Strategi pembinaan satuan Yonif 200/BN di Papua Pegunungan periode 2023-2024 menunjukkan upaya yang sangat sistematis, adaptif, dan multidimensional. Model pembinaan yang diterapkan secara konsisten merefleksikan pendekatan *smart power*, di mana kapabilitas militer (Ops Pamrahwan) diintegrasikan secara cerdas dengan pendekatan non-militer (OMSP). Pendekatan ini adalah respons strategis terhadap karakteristik konflik di Papua yang tidak lagi semata-mata militer, melainkan juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Pemeriksaan kesiapan operasi Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) secara menyeluruh mencakup personel dan materiil, menegaskan pentingnya kesiapan di semua lini untuk menghadapi operasi di daerah rawan. Satgas



Yonif 200/BN sendiri merupakan bagian dari upaya TNI untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

### **Kesiapan Operasional Melalui Pembinaan Personel yang Multidimensional**

Kesiapan operasional Yonif 200/BN sangat dipengaruhi oleh kualitas pembinaan personel. Para informan kunci dari Danyon hingga Batih menekankan pentingnya prajurit yang tangguh secara fisik dan mental untuk medan ekstrem, serta adaptif secara sosiokultural. Latihan survival, navigasi, dan taktik patroli yang disesuaikan dengan kondisi geografis Papua Pegunungan adalah fondasi kapabilitas militer

### **OMSP sebagai Ujung Tombak Kemampuan Teritorial dan Sosial**

OMSP menjadi instrumen utama untuk membangun kepercayaan (*trust-building*) dan meredam penolakan masyarakat. Konsep "Patroli Kemanusiaan" yang diterapkan oleh Pasi Ops, di mana patroli keamanan digabungkan dengan bantuan medis atau kegiatan sosial, adalah contoh nyata integrasi OMSP dalam operasi harian.

### **Peran Krusial Intelijen dalam Menghadapi Ancaman Hybrid**

Pasi Intel menjelaskan bagaimana *Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB)* dan deteksi multidimensional—meliputi human intelligence, pemantauan media sosial, dan laporan dari prajurit teritorial—digunakan untuk memetakan tidak hanya ancaman KKB, tetapi juga potensi konflik sosial dan dinamika sosial-politik yang kompleks.

### **Pembinaan Ideologi sebagai Benteng Moril dan Perekat Sosial**

Strategi ini melampaui pendekatan doktrinal semata, dengan fokus pada program "Prajurit Edukator" yang mampu menjelaskan Pancasila dalam konteks kearifan lokal. Ini adalah langkah cerdas untuk membuat ideologi negara lebih relevan dan



diterima oleh masyarakat adat.

### **Logistik Adaptif sebagai Pendukung Utama Keberlanjutan Operasi dan OMSP**

Meskipun menghadapi keterbatasan ekstrem di Papua Pegunungan, telah diadaptasi menjadi pendukung utama keberlanjutan operasi dan OMSP Yonif 200/BN. Danyon dan Wadanyon menekankan bahwa strategi logistik dirancang sangat responsif, menggunakan helikopter dan "jalur tikus" sebagai solusi inovatif untuk pengiriman material.

### **Kesimpulan**

1. Implementasi pembinaan satuan Yonif 200/BN selama pelaksanaan Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Kabupaten Yalimo periode 2023–2024 menghadapi sejumlah tantangan utama, meliputi keterbatasan infrastruktur dan akses logistik, karakter ancaman asimetris, kompleksitas sosial-budaya masyarakat, serta tekanan psikologis prajurit akibat medan operasi yang berat dan durasi penugasan.
2. Strategi pembinaan satuan Yonif 200/BN dilaksanakan secara holistik dan adaptif dengan menitikberatkan pada integrasi pembinaan personel dan karakter prajurit, pembinaan operasional dan teritorial yang responsif terhadap lingkungan sosial-budaya, serta pembinaan dukungan logistik dan ideologi strategis. Strategi ini diterapkan melalui pendekatan operasi militer selain perang yang terukur dan sesuai aturan pelibatan, didukung oleh mekanisme koordinasi internal dan eksternal serta evaluasi berkelanjutan.

### **Saran Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat mengembangkan kajian pembinaan satuan dalam konteks operasi militer selain perang (OMSP) secara lebih



mendalam, khususnya pada wilayah dengan karakter ancaman asimetris dan kompleksitas sosial-budaya yang tinggi. Integrasi pembinaan taktis, teritorial, dan intelijen sosial sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan kerangka konseptual dalam pengembangan teori ilmu pertahanan yang menekankan pendekatan keamanan manusia, legitimasi sosial, dan stabilisasi wilayah.

### **Saran Praktis**

#### **1. Bagi TNI Angkatan Darat**

TNI Angkatan Darat disarankan untuk mengadopsi temuan penelitian ini sebagai dasar penyempurnaan model pembinaan satuan pada penugasan Operasi Pengamanan Daerah Rawan, khususnya melalui penguatan pelatihan pra-penugasan, peningkatan kemampuan adaptasi sosial-budaya prajurit, serta evaluasi pasca-penugasan yang berorientasi pada kesiapan dan moril prajurit.

#### **2. Bagi Komando Atas dan Penyusun Kebijakan Pertahanan**

Komando atas disarankan untuk menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembinaan satuan dan program latihan OMSP yang lebih kontekstual dengan karakter wilayah Papua, serta memperkuat sinergi lintas fungsi dan lintas instansi guna meningkatkan efektivitas operasi pengamanan daerah rawan.

#### **3. Bagi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah di wilayah Papua Pegunungan disarankan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan satuan tugas TNI dan Polri dalam rangka mendukung stabilitas keamanan, pencegahan konflik sosial, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di wilayah rawan konflik.

#### **4. Bagi Masyarakat Papua**

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas keamanan melalui komunikasi yang konstruktif dengan aparat negara dan tokoh adat setempat,



sehingga tercipta hubungan saling percaya yang mendukung keberlanjutan keamanan dan integrasi nasional.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Andreas, P. (2003). Redrawing the line: Borders and security in the twenty-first century. *International Security*, 28(2), 78–111.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Caballero-Anthony, M. (2018). *An introduction to non-traditional security studies: A transnational approach*. SAGE Publications.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2012). Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems. Springer.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and "Mode 2" to a triple helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Ganor, B. (2008). *Security and border control: A strategic perspective*. Tel Aviv University Press.
- Saaty, T. L. (1980). *The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation*. McGraw-Hill.
- & Vargas, L. G. (2012). *Models, methods, concepts & applications of the analytic hierarchy process*. Springer.

### Jurnal

- Donnelly, J. (2021). Smart borders: The role of AI in border security. *Journal of Border Studies*, 36(4), 512–530.
- Farhan, H. M., Hariyono, H., & S, S. R. (2024). Strategi Kodam III/Siliwangi dalam pemberdayaan wilayah pertahanan untuk ketahanan nasional. *Journal of*



- Education, Humaniora and Social Sciences, 7(2), 759–768.  
<https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2350>
- Gao, Y., Liu, Y., Liu, L., & Fu, H. (2018). An integrated method for evaluating counterterrorism system based on SWOT and AHP methods. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*, 15(2), 1–17.
- Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. *Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006.
- Harefa, F., & Supriyadi, A. A. (2025). Leadership strategies for enhancing border security in Papua: A collaborative approach to surveillance and threat management. *Journal of National Paradigm - Based Resilience Strategy*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.61511/napbres.v2i1.2025.1731>
- Koloay, J. S., Antonius W., & Luky, G. (2024). The role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in supporting regional development acceleration in Papua. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i4.743>
- Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (1996). Emergence of a triple helix of university–industry–government relations. *Science and Public Policy*, 23(5), 279–286.
- Maxwell, D., & Slater, R. (2003). Food policy in complex emergencies: Lessons from Afghanistan, Sudan, and Ethiopia. *Disasters*, 27(4), 299–323.
- Önüt, S., Soner Kara, S., & Tosun, O. (2009). A fuzzy analytic network process-based SWOT analysis for the logistics center location selection problem: A case study from Turkey. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 20(2), 179–189.
- Schmidhuber, J., & Tubiello, F. N. (2007). Global food security under climate change. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(50), 19703–19708.
- Sumampouw, G. L., & Nurisnaeny, P. S. (2025). Geospatial intelligence analysis



to predict acts of security disturbance by KSTP in Nduga Regency, Papua Mountainous Province. *Security Intelligence Terrorism Journal*, 2(3).  
<https://doi.org/10.70710/sitj.v2i3.68>

Swinnen, J., & Squicciarini, P. (2012). Mixed messages on prices and food security. *Science*, 335(6067), 405–406.

### Artikel

ASEAN Secretariat. (2022). *ASEAN border trade agreements: Ensuring security and economic stability in Southeast Asia*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik perbatasan Indonesia-Malaysia 2022*. Jakarta: BPS.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2023). *Laporan tahunan pengawasan perbatasan 2022*. Kementerian Keuangan RI.

Food and Agriculture Organization. (1996). *Rome declaration on world food security and world food summit plan of action*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Halkis, M., & Bagus, I. Y. S. (2025). *Military operations for law enforcement: Joint operation of the Army Special Forces Command and the police during the "Nemangkawi" operation in Papua 2018*. *Social Development and Security*, 15(4). <https://doi.org/10.33445/sds.2025.15.4.2>

\_\_\_\_\_, The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua, *Journal Society*, Vol 8 No 1 (2020) , Published June 30, 2020, DOI :<https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182>

<https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/182/146>

International Crisis Group. (2021). *Border tensions and security in Southeast Asia*. Brussels: ICG.



Kementerian Pertanian RI. (2022). Laporan alih fungsi lahan pertanian di perbatasan Kalimantan. Jakarta: Kementan.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2020). Ketahanan nasional: Konsep dan implementasi dalam pembangunan nasional. Jakarta: Lemhannas RI.

----- (2022). Ketahanan pangan dan pertahanan semesta. Jakarta: Lemhannas RI.

Suryana, A. (2019). Tantangan ketahanan pangan di wilayah perbatasan Indonesia: Studi kasus Kalimantan Utara. Jakarta: Pusat Penelitian Ketahanan Nasional.

Suryaningrat, A. (2019). Pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia: Tantangan dan strategi. Jakarta: LIPI Press.

TNI AD RI. (2021). Strategi keamanan perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara. Jakarta: Kemhan RI.

----- (2023). Sinergi pertahanan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Jakarta: Pustaka Pertahanan.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sekretariat Negara RI. (2017). Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Kebijakan Satu Peta. Jakarta: Sekretariat Negara.



Jurnal Strategi Pertahanan Darat,  
Volume 11, Nomor 2, 2025

E-ISSN 2746-8496